



PASTIKAN PERBAIKAN LAYANAN PERIZINAN

Yogyakarta Tetap Terbuka bagi Investor

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan akan terus memperbaiki layanan publik untuk kebutuhan perizinan guna memastikan investasi di kota tersebut tetap terjaga dan tidak terpengaruh kasus dugaan suap yang menyeret mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti baru-baru ini.

"Kami berkomitmen *ndandani* (memperbaiki) layanan perizinan. Bukan untuk menghambat investasi tetapi memastikan semua sesuai aturan," kata Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi di Yogya, Selasa (14/6), seperti dilansir dari *Antara*.

Menurut Sumadi, Kota Yogyakarta tetap terbuka bagi investor yang akan menanamkan modal di kota tersebut dan ia pun memastikan iklim investasi tetap normal dan tidak terpengaruh operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan apartemen.

"Setiap hari kami rapat untuk mengevaluasi izin-izin yang sudah diterbitkan. Kami evaluasi lagi. Bukan untuk menghambat investasi," katanya.

Begitu pula untuk pengajuan perizinan baru yang masuk. "Jika permohonan izin belum sesuai aturan, maka

akan dikembalikan sehingga pemohon bisa melakukan perbaikan," sambungnya.

Bagaimanapun, lanjut Sumadi, Pemerintah Kota Yogyakarta harus memastikan bahwa investor tetap berminat menanamkan modal di Kota Yogyakarta karena investasi adalah bagian penting dari proses pembangunan. "Kami tetap terbuka dengan investor. Tidak perlu khawatir berinvestasi asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku. Tertib administrasi dan prosedur," katanya.

Operasi tangkap tangan oleh KPK terkait dugaan kasus suap perizinan di

Yogyakarta, lanjut Sumadi merupakan pembelajaran besar untuk pemerintah daerah. "Kami harus menapaki babak baru yaitu memberikan layanan terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku dan sekaligus berupaya menutup celah-celah aturan yang mungkin dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab," katanya.

Selain layanan perizinan, Sumadi pun memastikan Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengevaluasi layanan publik lain sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mengaksesnya. "Tepat syarat, waktu dan sesuai standar," katanya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005